

---

## ANALISIS PERAN GURU PPKN DALAM MENGATASI KRISIS MORAL SISWA SMA NEGERI 8 TANJUNG JABUNG TIMUR

Elisa Debora<sup>1</sup>, Siti Tiara Maulia<sup>2</sup>, Muhammad Ichsan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Jambi

Email: [elisadeboraa234@gmail.com](mailto:elisadeboraa234@gmail.com)<sup>1</sup>, [sititiaramaulia@unja.ac.id](mailto:sititiaramaulia@unja.ac.id)<sup>2</sup>, [m.ichsan@gmail.com](mailto:m.ichsan@gmail.com)<sup>3</sup>

**Abstrak:** Penelitian ini berangkat dari kekhawatiran terhadap merosotnya moralitas peserta didik, yang terlihat dari rendahnya kesadaran terhadap etika, rasa tanggung jawab, sikap sopan santun, kedisiplinan, serta perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan sekolah. Dalam konteks ini, guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memegang peranan krusial dalam menanamkan serta membimbing siswa untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai moral dan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi secara mendalam peran guru PPKn dalam mengatasi krisis moral di kalangan siswa SMA Negeri 8 Tanjung Jabung Timur. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PPKn menjalankan enam fungsi utama dalam pembinaan karakter moral siswa, yakni sebagai motivator, pengarah, inisiator, informator, evaluator, dan fasilitator. Dalam perannya sebagai motivator, guru memberikan keteladanan serta membangun kerja sama dengan guru Bimbingan Konseling (BK) dan orang tua. Namun demikian, implementasi peran tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain metode pengajaran yang kurang inovatif, keterlibatan orang tua yang belum maksimal, serta pengaruh negatif dari lingkungan eksternal. Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan strategi pembelajaran yang lebih kreatif dan kolaboratif agar nilai-nilai moral tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi mampu terinternalisasi dalam perilaku nyata siswa.

**Kata Kunci:** Peran Guru, Ppkn, Krisis Moral, Siswa, Pendidikan Moral.

**Abstract:** *This study is based on concerns about the decline in students' morality, which can be seen from the low awareness of ethics, sense of responsibility, politeness, discipline, and behavior that is not in accordance with the norms prevailing in the school environment. In this context, Pancasila and Citizenship Education (PPKn) teachers play a crucial role in instilling and guiding students to understand and practice moral values and Pancasila in everyday life. The purpose of this study is to explore in depth the role of PPKn teachers in overcoming the moral crisis among students of SMA Negeri 8 Tanjung Jabung Timur. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through observation, interviews, and documentation studies. The results of the study indicate that PPKn teachers carry out six main functions in fostering students' moral character, namely as motivators, directors, initiators, informants, evaluators, and facilitators. In their role as motivators, teachers provide role models and build cooperation with Guidance and Counseling (BK) teachers and parents. However, the implementation of this role still faces various obstacles, including less innovative teaching*

*methods, less than optimal parental involvement, and negative influences from the external environment. Therefore, a more creative and collaborative learning strategy update is needed so that moral values are not only understood conceptually, but can be internalized in students' real behavior.*

**Keywords:** *The Role Of Teachers, Ppkn, Moral Crisis, Students, Moral Education.*

## **PENDAHULUAN**

Guru merupakan salah satu elemen kunci dalam sistem pendidikan yang memiliki peran sentral dalam menentukan kualitas pembelajaran. Sebagai pelaku utama dalam interaksi pembelajaran di sekolah, guru berperan langsung dalam membentuk karakter dan nilai-nilai peserta didik. Di tengah krisis kesadaran moral yang kian mengemuka saat ini, keberadaan guru menjadi sangat vital dalam menanamkan nilai-nilai etika, tanggung jawab, dan sikap sosial yang sesuai dengan norma yang berlaku. Yang dimana perkembangan moral siswa banyak terjadi penyimpangan moral baik kategori ringan, sedang, maupun berat yang dilakukan oleh remaja. Sebagai seorang guru, mengajar merupakan peranan strategis dalam mengukir siswa menjadi pandai, cerdas, terampil, bermoral, dan berpengetahuan luas (Anwar, 2024). Peranan guru sangatlah penting dalam menentukan sejauh mana sikap siswa dalam bertingkah laku sebagai bagian dari masyarakat, apakah sesuai dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum yang berlaku di masyarakat.

Seiring dengan pesatnya kemajuan zaman dan teknologi, nilai-nilai luhur yang seharusnya tertanam dalam diri peserta didik mulai mengalami degradasi. Jika tidak diantisipasi dengan serius, perkembangan tersebut dapat mengikis penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, khususnya penjelasan Pasal 77J ayat (1) huruf a, dijelaskan bahwa tujuan dari penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membentuk peserta didik yang memiliki semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air. Pendidikan ini juga diarahkan agar siswa memahami serta menghayati nilai-nilai moral Pancasila, memiliki kesadaran berkonstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung tinggi prinsip Bhinneka Tunggal Ika, serta memiliki komitmen terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut PP di atas, bahwa nilai Pancasila masuk dalam pelajaran PPKn yang menegaskan bahwa siswa agar memiliki sifat

yang baik dan cerdas. Implementasi PPKn bisa dilihat dari bagaimana sikap dan tingkah laku siswa berkembang dan membantu masyarakat serta negara. Murid-murid yang selalu menghormati aturan dan nilai-nilai di mulai dari hal kecil akan menjadi orang yang santun dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Penerapan Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan Pancasila adalah sangat penting, negara yang memiliki nilai dan makna yang menjadi pegangan hidup (Dewi at al, 2021).

Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan krisis moral dengan menjadikan peserta didik pemahaman akan pentingnya moralitas dalam kehidupan sehari-hari dapat ditanamkan secara efektif melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan ini tidak hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan kewargaan, tetapi juga berperan dalam membentuk kepribadian peserta didik agar menjadi individu yang berakhlak mulia dan bermartabat. Dengan demikian, peserta didik diharapkan tidak sekadar menjadi penikmat proses pendidikan, tetapi mampu tumbuh sebagai pribadi yang dihormati dan diakui di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai moral melalui Pendidikan Kewarganegaraan menjadi hal yang sangat penting, khususnya bagi generasi muda. Moralitas sendiri berkaitan dengan seperangkat nilai yang menentukan ukuran baik dan buruk, benar dan salah dalam perilaku seseorang. Moral berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai apakah seseorang dapat dikatakan bersalah atau tidak, yang tercermin dari tingkat tanggung jawab serta dampak etis dari tindakan yang dilakukannya.

Pembinaan moral merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan, khususnya di lingkungan sekolah. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat mentransfer pengetahuan akademik, tetapi juga sebagai wadah dalam menanamkan dan membina nilai-nilai moral peserta didik. Namun demikian, pembinaan moral tidak semata-mata menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan formal, sebab lingkungan keluarga memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter anak sejak dini. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 40 siswa kelas XI (Fase F) di SMA Negeri 8 Tanjung Jabung Timur, peneliti menemukan sejumlah perilaku siswa yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip moral yang diharapkan. Mengacu pada pendapat Arikunto (2017), apabila jumlah populasi berkisar antara 300 hingga 500 orang, maka sampel yang diambil dapat berkisar antara 10% hingga 20%. Oleh karena itu, pengambilan 40 siswa sebagai sampel awal dalam penelitian ini telah sesuai dengan ketentuan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, bisa terlihat bahwa sopan santun yang mengucapkan salam kepada guru dan semua staf tata usaha sebanyak 9 siswa, berbicara ramah kepada guru, teman, dan semua warga sekolah sebanyak 10 siswa, menyimak penjelasan guru saat pembelajaran sebanyak 10 siswa, kemudian dilihat dari tanggung jawab melaksanakan jadwal piket kelas sesuai dengan yang disepakati sebanyak 11 siswa, mengumpulkan tugas dengan tepat waktu dan tidak mencontek teman sebanyak 10 siswa, mengikuti proses pembelajaran di kelas dari awal sampai akhir sebanyak 211 siswa. Dilihat juga dari mematuhi peraturan membaca peraturan yang ditempel di sekolah sebanyak 5 siswa, setiap hari datang ke sekolah tepat waktu sebanyak 14 siswa, memakai seragam lengkap setiap hari sebanyak 14 siswa.

Tetapi berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu MJ juga menjelaskan bahwasannya di SMA Negeri 8 Tanjung Jabung Timur masih sering terjadi krisis moral pada siswa seperti seringnya siswa yang terlambat, bolos waktu jam pelajaran, serta berperilaku tidak sopan. Bagi siswa yang terlambat datang ke sekolah harus bertanya kepada guru piket diperbolehkan untuk masuk, setelah mendapatkan izin dari guru piket untuk masuk lingkungan sekolah maka sebelum masuk kelas harus mendapat izin dari guru mata pelajaran yang sedang berlangsung untuk mendapat atau diizinkan untuk mengikuti pelajaran pagi itu, selain itu juga peserta didik juga mendapat sanksi agar tidak mengulangi hal yang sama dan dengan cara itu juga dapat membentuk karakter peserta didik untuk lebih berperilaku baik serta dapat menghormati guru.

Demikian dapat diartikan bahwa jenis pelanggaran yang dilakukan oleh siswa SMAN 8 Tanjung Jabung Timur banyak terjadi dan perlunya penanganan dengan cara memberikan bimbingan dan menerapkan nilai moral dan nilai-nilai pancasila terhadap siswa agar lebih paham akan hal yang dilakukan baik atau buruknya, benar atau salahnya dan yang baik dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan oleh siswa supaya menciptakan generasi yang lebih memiliki moralitas yang tinggi, taat akan peraturan dan menjunjung tinggi nilai-nilai serta norma-norma yang terdapat dalam Pancasila dengan penerapan pendidikan PPKn. Dengan penjabaran dari data dan latar belakang di atas, penulis sangat tertarik untuk mengangkat judul “Analisis Peran Guru PPKn Dalam Mengatasi Krisis Moral Siswa SMAN 8 Tanjung Jabung Timur”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 8 Tanjung Jabung Timur untuk menganalisis peran guru PPKn dalam mengatasi krisis moral siswa. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian berlangsung dari September 2024 hingga Mei 2025. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan sumber data primer berupa guru PPKn dan siswa kelas XI, serta data sekunder berupa dokumen dan arsip sekolah. Informan terdiri dari guru PPKn (informan utama), siswa (informan kunci), serta guru BK, kepala sekolah, dan orang tua (informan tambahan). Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Untuk menjamin validitas data, digunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Teknik triangulasi digunakan dalam penelitian ini untuk memastikan keabsahan data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, metode pengumpulan data (seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi), serta pada waktu yang berbeda. Proses analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman yang mencakup empat tahapan utama: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Seluruh proses ini dilakukan secara sistematis untuk menjamin keakuratan data yang diperoleh dan kesesuaiannya dengan fokus penelitian, yaitu mengidentifikasi peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam merespons krisis moral di kalangan siswa SMA Negeri 8 Tanjung Jabung Timur.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Analisis Peran Guru Ppkn Dalam Mengatasi Moral Siswa SMA Negeri 8 Tanjung Jabung Timur**

#### **1. Peran Guru PPKn sebagai Motivator Siswa**

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa guru PPKn di SMA Negeri 8 Tanjung Jabung Timur memainkan peran penting dalam membentuk karakter moral siswa, terutama sebagai motivator. Guru memberikan keteladanan dalam sikap disiplin, jujur, dan tanggung jawab, yang secara langsung menjadi contoh nyata bagi siswa. Sikap guru yang konsisten, seperti datang tepat waktu, menekankan kejujuran dalam ujian, serta memperlihatkan integritas dalam tindakan, memberikan dampak positif terhadap pembentukan moral siswa.

Selain itu, guru PPKn juga berperan melalui kolaborasi dengan guru BK dan orang tua dalam menangani kasus pelanggaran moral. Namun, kolaborasi ini masih bersifat reaktif dan

belum terstruktur dalam program pembinaan karakter yang bersifat preventif. Komunikasi antara sekolah dan orang tua pun umumnya hanya terjadi saat muncul masalah.

## **2. Peran Guru PPKn Sebagai Pengarah**

Penelitian ini menemukan bahwa guru PPKn di SMA Negeri 8 Tanjung Jabung Timur telah menjalankan peran sebagai pengarah (director) dengan cukup efektif, terutama melalui keteladanan, kepemimpinan moral, dan penanganan pelanggaran secara bertahap. Guru menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab yang menjadi contoh langsung bagi siswa. Namun, pendekatan ini masih bersifat reaktif karena lebih banyak menangani pelanggaran setelah terjadi, bukan melalui upaya pencegahan atau pembentukan kebiasaan moral secara proaktif.

Kolaborasi dengan guru BK dan sebagian orang tua turut memperkuat peran ini, meskipun keterlibatan orang tua masih belum merata. Faktor eksternal seperti pengaruh teknologi dan beragamnya kondisi moral siswa menjadi tantangan tambahan. Selain itu, pembelajaran PPKn masih didominasi metode ceramah yang kurang melibatkan siswa dalam diskusi kritis.

Kesimpulannya, peran guru PPKn sebagai pengarah memberikan pengaruh positif, tetapi belum maksimal. Diperlukan strategi yang lebih proaktif dan kolaboratif agar nilai-nilai moral tidak hanya ditaati sebagai aturan, tetapi benar-benar menjadi bagian dari karakter siswa.

## **3. Peran Guru PPKn Sebagai Inisiator**

Guru PPKn di SMA Negeri 8 Tanjung Jabung Timur telah menjalankan peran sebagai inisiator dalam membentuk karakter siswa melalui penciptaan budaya sekolah yang berkarakter. Inisiatif seperti budaya salam pagi dan prinsip 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun) diterapkan untuk menumbuhkan kebiasaan moral dalam keseharian siswa. Selain itu, kolaborasi dengan guru BK diterapkan secara humanis, dengan pendekatan dialogis untuk menangani pelanggaran moral.

Namun, peran ini masih menghadapi tantangan besar. Tidak semua orang tua terlibat secara aktif dalam mendukung pembentukan moral anak, dan pengaruh negatif media sosial makin memperburuk kondisi moral siswa. Meski program moral telah dijalankan, efektivitasnya masih terhambat oleh faktor eksternal dan metode pengajaran yang belum inovatif.

Kesimpulannya, peran guru PPKn sebagai inisiator telah menumbuhkan kebiasaan moral positif di lingkungan sekolah, tetapi perlu diperkuat dengan dukungan teknologi, keterlibatan orang tua yang lebih merata, dan pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual dan partisipatif agar nilai moral benar-benar tertanam dalam diri siswa.

#### **4. Peran Guru PPKn Sebagai Informator**

Guru PPKn di SMA Negeri 8 Tanjung Jabung Timur telah menjalankan peran sebagai informator dalam membentuk karakter moral siswa, terutama melalui keteladanan sikap dan diskusi nilai-nilai Pancasila seperti kejujuran dan toleransi. Keteladanan guru dalam bersikap disiplin dan sopan memberi pengaruh positif bagi sebagian siswa. Namun, metode yang digunakan masih cenderung konvensional dan kurang berkelanjutan, sehingga belum sepenuhnya efektif dalam menanamkan nilai moral secara mendalam.

Keterbatasan juga terlihat pada kurangnya penyampaian nilai moral di luar kelas serta minimnya keterlibatan orang tua. Lingkungan pergaulan dan pengaruh media sosial turut menjadi tantangan serius dalam mempertahankan nilai-nilai moral siswa.

Kesimpulannya, meskipun peran informator telah dijalankan dengan niat baik, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui inovasi metode pembelajaran, kolaborasi rutin dengan orang tua, dan integrasi nilai moral dalam kehidupan sehari-hari siswa agar Pancasila tidak hanya menjadi materi, tetapi menjadi bagian dari jati diri siswa.

#### **5. Peran Guru PPKn Sebagai Evaluator**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran guru PPKn sebagai evaluator dalam mengatasi krisis moral siswa di SMA Negeri 8 Tanjung Jabung Timur telah dijalankan, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan. Guru PPKn melakukan penilaian terhadap perkembangan karakter siswa melalui observasi langsung dan komunikasi dengan guru lain, terutama guru BK. Namun, proses evaluasi ini masih bersifat informal dan belum terintegrasi secara sistematis dalam kegiatan pembelajaran.

Selain itu, keterlibatan orang tua dalam memantau dan mengevaluasi perilaku siswa juga masih terbatas, yang turut memengaruhi efektivitas evaluasi moral. Di sisi lain, persepsi siswa mengenai kondisi moral di kelas pun beragam, mencerminkan bahwa proses pembentukan karakter belum merata hasilnya. Meskipun terdapat kesadaran akan pentingnya peran guru dalam mengevaluasi moral siswa, kurangnya koordinasi yang terstruktur, rendahnya partisipasi orang tua, dan ketiadaan instrumen evaluasi yang terstandarisasi membuat peran ini

belum optimal. Dengan demikian, dibutuhkan pendekatan yang lebih terorganisir dan kolaboratif agar evaluasi moral dapat berjalan secara menyeluruh dan mendukung pembentukan karakter siswa secara efektif.

## **6. Peran Guru PPKn Sebagai Fasilitator**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran guru PPKn sebagai fasilitator dalam mengatasi krisis moral siswa sudah terlihat melalui penerapan kontrak kelas, diskusi kelompok, dan penugasan yang mendorong kesadaran moral. Guru juga menangani pelanggaran secara dialogis, bukan semata-mata dengan hukuman. Namun, peran ini belum optimal karena kurangnya program refleksi perilaku yang terstruktur dan keterlibatan siswa yang belum merata. Dibutuhkan pembelajaran yang lebih kolaboratif dan bermakna agar pembinaan moral siswa lebih efektif.

## **B. Strategi Guru PPKn Dalam Mengatasi Moral Siswa SMA Negeri 8 Tanjung Jabung Timur.**

Guru PPKn menerapkan berbagai strategi untuk membentuk karakter dan moral siswa. Strategi utama adalah keteladanan, di mana guru menjadi contoh sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab yang ditiru oleh siswa. Diskusi kelompok juga dimanfaatkan untuk menumbuhkan kesadaran moral melalui saling berbagi pandangan, meskipun partisipasi siswa masih perlu ditingkatkan.

Pendekatan individual dilakukan melalui nasihat dan bimbingan personal, yang memperlihatkan kepedulian guru terhadap kondisi emosional dan perilaku siswa. Strategi ini didukung oleh peran guru BK yang menjadi mediator dan pendengar bagi siswa.

Selain itu, kerja sama dengan orang tua menjadi aspek penting, terutama dalam memberikan teladan di rumah dan memperkuat nilai moral yang diajarkan di sekolah. Evaluasi dan refleksi terhadap perilaku siswa dilakukan melalui observasi, meski belum ada program refleksi yang terstruktur.

Secara keseluruhan, strategi-strategi ini sudah berjalan, namun masih diperlukan penguatan terutama dalam hal konsistensi, keterlibatan orang tua, dan program refleksi agar upaya pembinaan moral siswa dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Peran Guru PPKn Dalam Mengatasi Moral Siswa SMA Negeri 8 Tanjung Jabung Timur dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran guru PPKn di SMA Negeri 8 Tanjung Jabung Timur dalam mengatasi krisis moral siswa sangat strategis dan mencakup enam fungsi utama: sebagai motivator, pengarah, inisiator, informator, evaluator, dan fasilitator. Sebagai motivator, guru memberikan keteladanan nyata dalam sikap dan perilaku sehari-hari, serta aktif membangun kolaborasi dengan guru Bimbingan Konseling (BK) dan orang tua untuk memperkuat pembinaan karakter siswa. Dalam perannya sebagai pengarah, guru membimbing siswa untuk menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.
2. Strategi guru PPKn dalam mengatasi krisis moral siswa di SMA Negeri 8 Tanjung Jabung Timur dilakukan melalui pendekatan keteladanan, diskusi kelompok, bimbingan individual, kerja sama dengan orang tua, serta evaluasi dan refleksi. Guru menjadi teladan dalam sikap dan perilaku, mendorong diskusi yang membangun kesadaran moral, serta memberikan perhatian personal kepada siswa yang bermasalah. Kolaborasi dengan orang tua juga memperkuat upaya pembinaan, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam konsistensi dan pelaksanaan program reflektif secara lebih terstruktur

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar, S. S. (2024). Tanggung Jawab Pendidikan Dalam Perspektif Psikologi Agama. *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 1(1), 11–21.
- Arikunto, S. (2017). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. In Rineka Cipta.
- Azhar, A., Sunu, I. G. K. A., & Natajaya, I. N. (2021). Peran Guru Ppkn Dalam Meningkatkan Nilai Moral Siswa Di Madrasah Aliyah ( Ma ) Syamsul Huda Desa Tegallinggah-Buleleng. *Jurnal Media Komunikasi*, 3(2), 127–136.
- Fahdini, A. M., Furnamasari, Y. F., & Dewi, D. A. (2021). Urgensi Pendidikan Karakter Dalam Mengatasi Krisis Moral Di Kalangan Siswa. *Pendidikan Tambusai*, 5(3), 9390–9394.